

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA NO. 3 TAHUN 2010 DI
BANDAR LAMPUNG TENTANG LARANGAN MEMBERI SESUATU
KEPADA PENGEMIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Muamalah**

Oleh:

Sinta Yulia Marta

1421030140

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H/2018 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA NO. 3 TAHUN 2010 DI
BANDAR LAMPUNG TENTANG LARANGAN MEMBERI
SESUATU KEPADA PENGEMIS**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:

SINTA YULIA M

NPM: 1421030140

Program Studi : Muamalah

Pembimbing I : **Dr.H Khairudin, M.H.**

Pembimbing II : **Dr.H. Yusuf Baihaqi, M.A.**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440/2018 M**

ABSTRAK

Memberi sedekah adalah perbuatan yang dianjurkan dalam Agama Islam. Jika dikaitkan dengan kondisi negara kita, yang mana kemiskinan masih menjadi masalah hampir di setiap daerah, maka sedekah termasuk salah satu hal yang sangat diharapkan bagi rakyat miskin khususnya bagi para pengemis yang banyak berkeliaran di jalan-jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Bandar Lampung memiliki segudang masalah yang dilatarbelakangi masalah ekonomi. Jumlah pengangguran terus meningkat dan jumlah pengemis pun bertambah. Hal ini merupakan masalah yang dilematis bagi Bandar Lampung. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini, ialah dengan disahkannya Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Larangan memberi pengemis.

Dalam hal ini, penulis akan mencoba memahami pelaksanaan perda No 3 Tahun 2010 tentang larangan memberi pengemis dan pandangan hukum Islam tentang Larangan memberi pengemis yang dapat dijadikan referensi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung? Bagaimanakah Pandangan hukum Islam tentang Larangan memberi pengemis di Kota Bandar Lampung?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam tentang konsep memberi sedekah, fakir miskin dan pengemis, juga larangan memberi sedekah kepada pengemis dalam Perda Bandar Lampung No 3 Tahun 2010. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu metode penelitian pustaka (library research) yaitu bentuk penelitian yang sumbernya diperoleh dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini adalah memberi sedekah memiliki aturan yaitu etika sedekah yang baik dan ada orang yang berhak ataupun yang tidak berhak menerimanya. Islam juga mengemukakan adanya perbedaan pengemis dan fakir miskin yaitu orang miskin ialah orang yang tidak memiliki cukup uang untuk hidupnya tetapi tidak meminta-minta seperti pengemis.

Berdasarkan perda ini tidak secara totalitas melarang umat Islam bersedekah, hanya berlaku pada lokasi-lokasi tertentu saja. Yang mana, di lokasi-lokasi ini lah para pengemis profesional menjalankan pekerjaannya. Menurut penulis, larangan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam karena pengemis-pengemis tersebut telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu, pengemis tersebut tidak berusaha menjaga kehormatan diri mereka dengan meminta-minta yang sudah jelas diharamkan oleh Rasul. Banyak juga dari pengemis-pengemis tersebut yang tidak berhak menerima sedekah karena Islam juga telah menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menerima sedekah. Islam sendiri tidak memungkiri adanya aturan baru jika aturan tersebut demi kemaslahatan umatnya. Islam juga tidak memungkiri adanya perubahan hukum seiring perubahan zaman.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp. Fax. (0721) 703289 Bandar Lampung 35137

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara

Nama : Sinta Yulia M

NPM : 1421030140

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap PERDA No. 3
Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan
Memberi Sesuatu Kepada Pengemis

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan
Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Khanuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.
NIP.197403072000121002

Mengetahui

Ketua Prodi Muamalah

Dr. H. A. Kurni Ja'far, S.Ag., MH.
NIP.197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Perda No 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis.** Oleh: **SINTA YULIA M, NPM. 1421030140,** Jurusan: **MUAMALAH,** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum pada hari/tanggal: Selasa, 18 September 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua

Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

Sekretaris

Ahmad Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Penguji I

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji II

Dr. Khairuddin, M.H.

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ¹

Artinya : (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (Q.S. Al-Baqarah: 273)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 57.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupanjatkan kepadamu Tuhan Yang Maha Esa, atas takdir-Mu Engkau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Skripsi ini kupersembahkan teruntuk orang-orang yang kusayangi dan selalu dengan penuh semangat dan dalam menghadapi suka dan duka senantiasa mendukung dan mendoakan ku di setiap waktu kehidupanku. Untuk itu saya tuturkan rasa syukur dan terimakasih kepada :

1. Orang Tuaku yang tercinta, yang selalu menyemangatiku dan mendoakanku tanpa henti. Inilah hadiahku kepada kalian, ribuan terimakasih aku mungkin tidak akan cukup membalasnya, semoga Allah yang membalas kemuliaan hati kalian. Tanpa kaliah diriku tak ada artinya;
2. Ita Anita dan Sarjono, Junaidi Abdullah dan Septi Eka Putri yang selalu menyemangatiku juga memabantu segala hal yang tak terhingga;
3. Terakhirku persambahkan skripsi ini untuk keluarga besarku keluarga besar yang selalu mendoakan dan juga memotivasi terhadap sinta serta masukan-masukan yang telah diberikan.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Sinta Yulia Marta, Anak Ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhamad Syukur dan Ibu Yuliasih, lahir di Martapura, Oku Timur pada 18 September 1996.

Riwayat Pendidikan Penulis mulai :

1. Sekolah Dasar Negeri 06 Martapura masuk Sekolah Dasar pada tahun 2003 dan Lulus Sekolah Dasar Pada Tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2009 di SMPN 01 Martapura dan Lulus pada Tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2011 di SMAN 02 Martapura dan Lulus pada tahun 2014.
4. Pada tahun 2014 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah dan selesai pada tahun 2018.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGEMIS DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Konsep Dasar Infak	
1. Pengertian Infaq	17
2. Dasar Hukum Islam	21
a. Al-Qur'an.....	21
b. Al- Hadist	25
c. Undang-Undang.....	26
3. Macam- Macam Infaq	26
a. Infak Wajib	26
b. Infak Sunah.....	26

B. Konsep Dasar Sedekah	
1. Pengertian Sedekah	27
2. Dasar Hukum Sedekah	29
a. Al-Qur'an	29
b. Al- Hadist	30
c. Undang-Undang	31
3. Macam- Macam Sedekah	32
a. Shadakoh Wajib.....	32
b. Shadakoh Sunah	33
C. Pengemis dan Implimintasinya	
1. Pengertian pengemis	34
2. Dasar Hukum Larangan Mengemis	36
a. Al-Qur'an	37
b. Al- Hadist	38
c. Undang-Undang	38
3. Implikasinya Perbuatan Mengemis	40
4. Komunitas Pengemis.....	41
5. Lokasi	42
6. Penghasilan Pengemis	43

**BAB III GAMBARAN UMUM PERDA BANDAR LAMPUNG NO 3
TAHUN 2010 TENTANG LARANGAN MEMBERI SESUATU
KEPADA
PENGEMIS**

A. Pengertian Perda.....	45
B. Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah	47
C. Gambaran Isi Perda No 3 Tahun 2010 Tentang Larangan Memberi Pengemis	48
D. Bentuk Larangan dan Sanksi Bagi Pemberi Pengemis	56
E. Implementasi Perda No 3 Tahun 2010 Tentang Larangan Memberi Pengemis.....	57

F. Dampak dari Penerapan PERDA No. 3 Tahun 2010 Tentang Larangan Memberi Sesuatu Pada Pengemis di Kota Bandar Lampung	60
---	----

BAB IV ANALISIS

A. Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2010 Di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Pengemis	63
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Larangan Memberi Pengemis Di Bandar Lampung.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi skripsi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul proposal ini. Adapun judul skripsi ini adalah “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERDA NO. 3 TAHUN 2010 DI BANDAR LAMPUNG TENTANG LARANGAN MEMBERI SESUATU KEPADA PENGEMIS**”, maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca sebagai berikut:

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penilaian bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan.²

Hukum Islam adalah nama yang biasa di berikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang di wahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhiya sebaik-baiknya, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua* Balai Pustaka, Jakarta: 1997, h. 37

manusia.lainnya adalah syari'ah atau lengkapnya syari'ah Islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut syariah Islam.³

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010

merupakan Peraturan Daerah di Bandar Lampung yang telah mengatur dengan tegas larangan memberi sumbangan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Dimana tercantum pemberian sanksi bagi pemberi uang kepada pengemis dan anak jalanan dapat didenda paling banyak Rp 1 juta atau ancaman kurungan selama 1 bulan.⁴

Larangan adalah perintah (aturan) yg melarang suatu perbuatan: pemerintah mengeluarkan mengirim emas ke luar negeri⁵

Memberi adalah menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu.⁶

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.⁷

³Hasby Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta :Bulan Bintang,1995), hlm 44.

⁴Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010 Tentang Pemberian Kepada Pengemis.

⁵Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976 hlm:254

⁶*Ibid*, hlm:298

⁷Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 29

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari Skripsi ini adalah larangan dalam memberi sesuatu kepada pengemis di tempat umum untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain dalam pandangan hukum Islam di Kota Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul Skripsi ini “Analisis Hukum Islam Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2010 di Bandar Lampung Tentang Larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis.

1. **Alasan Objektif**, banyak sekali pengemis yang kita jumpai di Kota Bandar Lampung khususnya di pusat keramaian seperti lampu merah, dan pasar. Tidak sedikit dari para pengemis pun yang membuat mereka malas mencari pekerjaan lainnya dikarenakan mengemis merupakan pekerjaan yang mudah. Pengemis yang berkeliaran di lampu merah dan pasar tersebut masih mempunyai fisik yang sehat untuk mencari pekerjaan selain mengemis, tetapi ada pula pengemis di sana yang mengemis dengan berbagai modus untuk mendapatkan belas kasihan, padahal orang tersebut masih bisa bekerja jika dilihat dari fisiknya, dalam hal ini perihal tentang pengemis yang selalu ada sepanjang zaman dan dijadikan sebagai profesi perlu dikaji dalam hukum Islam;

2. **Alasan Subjektif**, ditinjau dari aspek bahasan, judul Skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang di pelajari di bidang Muamalah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Berbagai aspek kehidupan manusia diatur secara lengkap di dalamnya. Termasuk hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial. Dan sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan pertolongan. Seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an.⁸

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧١

Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sebagai salah satu wujud perbuatan dari sikap tolong menolong dalam kebaikan adalah berbuat sedekah. Sedekah sangat dianjurkan di dalam Agama Islam. Bahkan anjuran sedekah di dalam Al-Qur'an dikemas dalam ungkapan yang sangat menarik hati dan memotivasi kita untuk melakukannya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yaitu sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang

⁸ Q.S Al- Baqarah (2) : 271

relatif terbelakang dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global.⁹

Dampak krisis yang diperberat oleh terjadinya berbagai bencana yang telah menyebabkan banyak orang mengalami keterpurukan ekonomi, tidak sedikit usaha yang dijalankan berakhir dengan pemutusan hubungan kerja dan juga berakibat pada melambungnya harga barang kebutuhan sehingga banyak para orang tua yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan. Dampak dari pemutusan hubungan kerja tersebut tidak saja menimbulkan pengangguran, bahkan merupakan ancaman meningkatnya kejahatan.¹⁰

Di Bandar Lampung, krisis ekonomi lebih dari sekedar ketidakseimbangan dalam fundamental perekonomian. Setidaknya, krisis ekonomi itu mengungkapkan kelemahan mendasar negara Indonesia. Masyarakat modern yang serba kompleks yaitu sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh teknologi mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi yang ternyata membawa dampak yang bersifat kausalitas dalam perkembangan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dari sektor ekonomi, sosial, politik, bahkan mempengaruhi tatanan nilai budaya suatu bangsa. Secara material, arus perkembangan dan pertumbuhan tersebut

⁹http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=3 (diakses 27 Oktober 2017).

¹⁰Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan kemiskinan*, (Bandung: Romaja Rosdakarya, 2010) hlm. 78

berjalan dengan tanpa rintangan dan bahkan menjadi kebanggaan suatu bangsa.

Di satu sisi, memang perubahan-perubahan tersebut telah membawa dampak kemajuan bagi kehidupan masyarakat suatu bangsa, namun di sisi lain dari perubahan tersebut ternyata membawa dampak terjadinya kesenjangan yang signifikan. Di satu pihak, memang telah berdiri tegak bangunan-bangunan mewah yang membanggakan yang menjadi pusat perhatian, tetapi tidak jauh dari area tersebut ternyata tumbuh perkampungan kumuh yang memprihatinkan dengan kompleksitas permasalahan yang di dalamnya perlu segera mendapatkan perhatian khusus, yang sungguh hal ini adalah induk permasalahan yang dapat menghadirkan permasalahan baru yang masuk dan menyebar ke dalam tatanan kehidupan masyarakat suatu bangsa, yang hal itu pada akhirnya akan menjadi sebuah problem sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara kompleks.

Di daerah-daerah atau di desa-desa yang notabene belum tersentuh pembangunan ekonomi, lapangan pekerjaan sangat terbatas. Demi untuk menghidupi diri dan keluarga, masyarakat desa berbondong-bondong mencari lapangan pekerjaan di kota. Akan tetapi, kehidupan di kota pun tidak jauh berbeda dengan di desa. Mereka tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan karena sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya

angka pengangguran semakin meningkat, khususnya di kota Bandar Lampung.

Para sosiolog memandang masalah sosial sebagai situasi tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut sebagian besar orang. Sedangkan para pekerja sosial sering mendefinisikan masalah sosial sebagai terganggunya keberfungsian sosial individu, kelompok atau komunitas sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, merealisasikan nilai-nilai yang dianutnya, serta menjalankan perannya di masyarakat.¹¹

Salah satu masalah sosial yang paling dikenal oleh banyak orang yaitu kemiskinan. Banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah akar dari masalah sosial lainnya, contoh: ketergantungan alkohol, pengangguran, diskriminasi, masalah kesehatan. Masalah masalah tersebut dapat terjadi bermlai dari faktor kemiskinan taua kondisi perekonomian yang melemah, namun sebaliknya, masalah-masalah tersebut dapat juga menjadi penyebab adanya kemiskinan.¹²

Jumlah orang miskin di Indonesia hingga pada tahun September tahun 2016 yakni sekitar 27.746.32 jiwa.¹³ meski kadang tumpang tindih namun akan lebih kelam lagi jika didalamnya dimasukan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau yang telah diberi label oleh

¹¹ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Press, 2003) hlm. 70

¹² *Ibid*, hlm 72

¹³ Garis Kemiskinan Indonesia, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1120> diakses pada 18/01/2018 pukul 00.39

Departemen Sosial (Dsos) sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang didalamnya berbasis jutaan gelandangan dan pengemis, wanita tuna sosila, orang dengan kecacatan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), komunitas ada terpencil (KAT), anak jalanan, pekerja anak, jompo terlantar, dan sebagainya.¹⁴ Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah seorang keluarga atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dan karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (Jasmani, Rohani, dan Sosialnya secara memadai dan wajar).¹⁵

Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial merupakan salah satu factor yang memicu kehadiran gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Indonesia yang tidak bisa lepas dari melemahnya kekuatan ekonomi untuk menolong tumbuhnya lapangan pekerjaan yang baru sekaligus mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.¹⁶ Sebagai gejala sosial, masalah gelandangan sudah lama hadir ditengah-tengah kita.¹⁷ Di daerah perkotaan misalnya, keberadaan gelandangan dan pengemis kian menjamur dan tidak dapat dihindari keberadaannya ditengah kehidupan masyarakat.

¹⁴ Edi Suharto, *Kebijakan Sosisal Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 84

¹⁵ Ubai Fadilah, Analisis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Indonesia menggunakan Metode Fuzzy C-Mean Clustering dan Biplot, Skripsi (Jakarta: Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sarif Hidayatullah, 2011), hlm 7.

¹⁶ Faiz Amrizal, Implementasi Perda..., hlm. 2.

¹⁷ Ashab Mahasin: GELANDANGAN (pandangan ilmuan sosial), (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm 125.

Faktor yang paling berpengaruh terhadap masalah ini yaitu factor kemiskinan yang kian merajalela. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia memiliki hubungan erat dengan semakin derasya arus urbanisasi masyarakat pedesaan menuju perkotaan.¹⁸ Sehingga mengemis pada umumnya menjadi salah satu dampak negatif dari pembangunan daerah perkotaan, bahwa pembangunan di perkotaan berbanding terbalik dengan keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan, sehingga masyarakat desa memandang bahwa hidup akan lebih terjamin jika mampu mengais rezeki di perkotaan.¹⁹

Konsekuensi menjadi pusat pemerintah, pembangunan kantor-kantor, tempat perbelanjaan, dan sarana hiburan menjadi suatu keniscayaan, tak pelak faktor ini menjadi pendorong kaum urban untuk mengadu nasib.

Bagi masyarakat miskin tanpa keterampilan dan tidak mendapatkan pekerjaan di kota, maka solusi terbaik bagi mereka untuk mendapatkan uang adalah dengan cara memohon belas kasihan orang atau meminta minta atau mengemis. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah, khususnya pemerintah provinsi. 3 Tingkat kemiskinan yang parah inilah yang kemudian memicu setiap orang untuk melakukan segala cara agar tetap hidup. Kondisi tersebut kemudian “memaksa” anak untuk terlibat dan ikut serta berusaha keluar dari tingkat kesulitan hidup. Maka tidak jarang

¹⁸ Faiz Amrizal, Implementasi Perda hlm 3.

¹⁹ Ibid., hlm 3,

lampu merah, perempatan jalan, terminal, pasar, dan tempat keramaian lainnya adalah tempat yang dirasa mudah untuk menghasilkan uang, hanya dengan menengadahkan tangan atau dengan sedikit menggunakan peralatan sederhana dan nyanyian-nyanyian khas pun dilantunkan, sekedar mengharapkan imbalan uang recehan logam walaupun tidak jarang nyanyian mereka dihargai dengan gratis atau hanya mendapat ucapan terima kasih. Definisi pengemis menurut Peraturan Daerah di Bandar Lampung No 3 Tahun 2010.²⁰

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010, tentang penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan menimbang:

1. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi Nilai-nilai Keadilan, ketertiban dan kemanfaatan sesuai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu melakukan pembinaan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis agar mereka dapat menjadi warga Kota Bandar Lampung yang bermartabat;
2. Bahwa mengingat keberadaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis merupakan Fenomena Sosial yang keberadaannya membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain serta Ketertiban

²⁰jurnal.pemkot-bandar-lampung-terus-tertibkan-anjal-dan-gepeng.html (diakses pada tanggal 8-11-2017)

Umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran Eksploitasi dan tindak kekerasan;

3. Bahwa Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis merupakan warga yang memiliki Hak dan Kewajiban yang sama serta perhatian yang sama sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara Komprehensif, Terpadu, Terarah dan Berkeseimbangan dengan melibatkan berbagai unsur baik 6 Pemerintah maupun Non Pemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak. Dinas Sosial saat ini sedang berupaya mengurangi pertumbuhan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dengan cara menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tersebut. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sering melakukan razia bagi para Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan tersebut dan mereka diberikan pembinaan di Panti dan yang masih memiliki keluarga mereka dikembalikan lagi kekeluarganya. Akan tetapi kenyataan dilapangan masih ada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dipinggiran Kota Bandar Lampung, khususnya diperempatan Lampu merah di jalan protokol yang banyak dilalui oleh para pengguna jalan. Namun dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

belum cukup optimal dalam kinerja penertiban Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan di Kota Bandar Lampung.²¹

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang larangan memberi pengemis di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah:

- a. Dari Segi Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan teori, konsep, pelaksanaan Tugas pokok, fungsi dan Tujuan Dinas Sosial dalam penerbitan Pengemis berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung. Kegunaan penulisan untuk pelengkap secara objektif dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang ada dalam penertiban Pengemis di Kota Bandar Lampung berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

²¹Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010 tentang larangan Memberi Sesuatu Kepada Pengemis.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Sosial dalam penertiban Pengemis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembeding dalam keilmuan di bidang Muamalah, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam penertiban pengemis berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung;
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam memperaktekan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama belajar di fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library Reasearch*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan ke pustakaan, membaca buku-buku, literatur dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.²² Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori-teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

²²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hlm.10

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menilai secara objektif data yang di kaji kemudian menganalisis data tersebut dalam Hukum Islam dan Undang-Undang.¹² Deskriptif yang di maksud yaitu untuk mendapatkan saran-saran mengenai sesuatu yang di lakukan dalam mengatasi masalah tertentu.

3. Data dan Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari sumber-sumber bacaan. Data sekunder ini terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Yaitu sumber utama yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok permasalahan, bahan hukum primer penulis pergunakan adalah Al- Quran, Al- Hadist, berdasarkan Peraturan Daerah;

b. Bahan hukum Sekunder

Yaitu antara lain mencakup dokumen- dokumen resmi, buku- buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder penulis peroleh dari refrensi, buku- buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier antara lain, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Enslikopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan peneltian kepustakaan yaitu, mencari data mengenai objek pnelitian dalam penelitian.²³ dalam penelitian ini didokumentasi dengan cara mengambil dokumen dari tempat peneltian berupa bahan tertulis yang berisi keterangan-keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan Data atau *Editing*, adalah memeriksa daftar peratanyaaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.

Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang telah diselesaikan.²⁴

- b. Sistematika Data (*Sistemizing*) bertujuan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁵ Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah

²³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, cet. 4, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005) hlm. 236

²⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012) hlm 153

²⁵*Ibid*, hlm 157

diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori- kategori dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Selanjutnya setelah data diperoleh dianalisa secara analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²⁶ Kesimpulan akhir menggunakan pendekatan metode deduktif yaitu, dengan cara menjelaskan dalil-dalil umum atau generalisasi- generalisasi atau teori-teori umum sebagai dasar untuk menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁶Suharsini Arikunto, *OP. Cit*, Hlm 125

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Infaq

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiqu* , artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram.

Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.²⁷

Oleh karena itu Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang dalam perjalanan.

²⁷ Majalah OASE Desember 2012 . 15.

Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang di lakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut islah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantara nya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : *"Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain, "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran."*²⁸

²⁸Az Zuhaili, Wahbah. Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II. Darul Fikr. Damaskus. 1996.916

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa infaq berasal dari bahasa Arab, namun telah dibahasa Indonesiakan dan berarti; pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab (infaq قِافَا). Akar kata yang berarti sesuatu yang habis. Dalam al-Munjid, dikatakan bahwa infaq boleh juga berarti dua lubang atau berpura-pura.

Menurut KH. Abdul Matin,²⁹ infaq mempunyai dua makna pokok, yakni :

1. Terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu;
2. Tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Dua pengertian Infaq tersebut, makna yang relevan dengan pengertian infaq di sini, adalah makna yang pertama.

Sedangkan pengertian infaq yang kedua lebih relevan dipergunakan untuk pengertian munafiq. seseorang yang menafkahkan hartanya secara lahiriyah, akan hilang hartanya di sisinya dan tidak ada lagi hubungan antara harta dengan pemiliknya. Adapun makna kedua adalah; seorang munafiq senantiasa menyembunyikan kekufurannya, dan atau tidak ingin menampakkan keingkarannya terhadap Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata “Infaq” digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran / nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Firman Allah dalam QS al-

²⁹ Abdul matin, Wawancara, Lamongan, tanggal 13 Oktober 2012.

Baqarah (2) : 262 dan 265 serta QS al-Anfal (8) : 36 dan al-Taubah (9) : 54 merupakan sebagian ayat yang dapat menjadi contoh keterangan di atas³⁰ Seperti yang telah kita ketahui bahwa kata “infaq” terambil dari kata berbahasa Arab infaq yang menurut penggunaan bahasa berarti “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan berbagai sebab : kematian, kepunahan, penjualan dan sebagainya. Atas dasar ini, Al-Quran menggunakan kata infaq dalam berbagai bentuknya – bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata “harta” setelah kata infaq. Misalnya QS al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat di mana Al-Quran tidak menggandengkan kata infaq dengan “harta”, sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain QS al-Ra’d ayat 22 dan al-Furqan ayat 67.

Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa pengertian Infaq menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infaq memiliki beberapa batasan, sebagai berikut : Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang

³⁰ An Nawawi. Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII. ,(Darul Fikr. Beirut. 1982), 32.

diperintahkan ajaran islam. Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan ke manusia sesuai dengan ajaran Islam.

Kata infaq adalah kata serapan dari bahasa Arab: al-infâq. Kata al-infâq adalah mashdar (gerund) dari kata anfaqa-yunfiqu-infâq[an]. Kata anfaqa sendiri merupakan kata bentukan; asalnya nafaqa-yanfuqu-nafâq[an] yang artinya: nafada (habis), faniya (hilang/lenyap), berkurang, qalla (sedikit), qalla (sedikit), dzahaba (pergi), kharaja (keluar). Karena itu, kata al-infâq secara bahasa bisa infâd (menghabiskan), ifnâ' (pelenyapan/pemunahan), taqlîl (pengurangan), idzhâb (menyingkirkan) atau ikhrâj (pengeluaran).³¹

B. Dasar Hukum Infaq

1. Al-Qur'an Tentang Infaq

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq: 7) yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) serta

³¹ Zallum, Abdul Qadim, *Al amwal fi Dawlailil Khilafah*, cetakan I (Beirut, Darul Ilmi Lil Malayin. 1983), hlm. 55.

untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq (QS al-Baqarah [2]: 267).³²

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tata cara membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman tentang karakter 'Ibâdurrahmân: yang artinya *“Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak isrâf (berlebihan) dan tidak (pula) iqtâr (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara demikian.”* (QS al-Furqan [25]: 67). Selain itu Allah Swt. juga berfirman: *“Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”* (QS al-Isra' [17]: 26)³³

Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-Juraij dan kebanyakan mufasssir menafsirkan isrâf (berlebihan) sebagai tindakan membelanjakan harta di dalam kemaksiatan meski hanya sedikit. Isrâf itu disamakan dengan tabdzîr (boros). Menurut Ibn Abbas, Ibn Mas'ud dan jumhur mafasssir, tabdzîr adalah menginfakkan harta tidak pada tempatnya. Ibn al-Jauzi dalam Zâd al-Masîr mengatakan, Mujahid berkata, “Andai seseorang menginfakkan seluruh hartanya di dalam kebenaran, ia tidak berlaku tabdzîr. Sebaliknya,

³² Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur'an Al Azhim Juz II*. (Darul Ma'rifah. Beirut. Cetakan III. 1989), 51.

³³ Ibnu Katsir. *Tafsir al Qur'an Al Azhim Juz II*. (Darul Ma'rifah. Beirut. Cetakan III. 1989), 52..

andai ia menginfakkan satu mud (25 ribu atau bisa lebih) saja di luar kebenaran, maka ia telah berlaku tabdzîr.”³⁴

Dengan demikian menginfakkan untuk pembangunan masjid dalam pembangunannya mekanismenya tidak diperbolehkan bervoya-foya. harta di luar ketaatan kepada Allah maka itu adalah isrâf; siapa yang menahan dari infaq di dalam ketaatan kepada Allah maka itu adalah iqtâr (kikir); dan siapa saja yang membelanjakan harta di dalam ketaatan kepada Allah maka itulah infaq yang al-qawâm.”³⁵ Jadi, yang dilarang adalah isrâf dan tabdzîr, yaitu infaq dalam kemaksiatan atau infaq yang haram. Infaq yang diperintahkan adalah infaq yang qawâm, yaitu infaq pada tempatnya; infaq yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam rangka ketaatan kepada Allah; alias infaq yang halal.³⁶

Infaq yang demikian terdiri dari infaq wajib, infaq sunnah dan infaq mubah. Infaq wajib dapat dibagi tiga : salah satunya adalah yang pertama, infaq atas diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan. Kedua, zakat.³⁷ Ketiga, infaq di dalam jihad. Infaq sunnah merupakan infaq dalam rangka hubungan kekerabatan, membantu teman, memberi makan orang yang lapar, dan semua bentuk sedekah lainnya. Sedekah adalah semua bentuk infaq dalam rangka atau dengan niat ber-

³⁴ *Ibid.*, 53-54.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), 72.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung; PT Alma' Arif, 1987), 178

³⁷ *Ibid.*

taqarrub kepada Allah, yakni semata-mata mengharap pahala dari Allah Swt. Adapun infaq mubah adalah semua infaq halal yang di dalamnya tidak terdapat maksud mendekatkan diri kepada Allah.³⁸

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:³⁹

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

٢٤٥

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

Kemudian dalam ayat lain juga di sebutkan tentang dasar hukum infaq yang artinya sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ وَالْعِظَمِينَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”⁴⁰

³⁸ Ibid.73

³⁹ QS Al-Baqarah 245

³⁹ Q.S Ali Imran (3) :134

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam Al Quran dijelaskan sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٥

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya” (QS. Al Baqarah 215).

2. Hadist Tentang Infaq

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ

Artinya : Barang siapa menafkahkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya baginya sebanyak 700 lipatan. (HR Tirimidzi).

3. Undang-Undang Tentang Infaq

Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Makna yang disebutkan terakhir itu, berarti sumbangan harta untuk kebaikan, selain zakat. Pendapat lain mengatakan bahwa infaq adalah membelanjakan harta. Sejalan dengan itu, penjelasan Pasal 13 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disishkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai oleh ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat, untuk kemaslahatan umum.⁴¹

C. Macam-Macam Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi dua macam antara lain sebagai berikut:⁴²

1. Infaq Wajib

Aplikasi dari Infaq Wajib yaitu Mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti :

- a. Membayar mahar (maskawin);
- b. Menafkahi istri;

⁴¹ Nasruddin dan Dewani Romli, *Diskusi Implementasi Zakat*, Al-‘ Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari’ah IAIN RIL, Vol X, No 1, Januari 2011), h 77

⁴² QS Al-Kahfi 18:43

c. Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.

2. Infaq Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infaq tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam Sebagai berikut :

- a. Infaq untuk jihad;
- b. Infaq kepada yang membutuhkan.

D. Konsep Dasar Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Secara etimologi sedekah berasal dari bahasa arab yang diambil (*mustaqya*) dari kata (benar). Karena sedekah menjadi tanda atau dalil atas kebenaran yang mengeluarkan sedekah atas keimanan nya secara syariah, sedekah berarti beribadah kepada Allah dengan cara menafkahkan (*infaq*) sebagian harta yang di luar kewajiban syariah. Kata sedekah dalam bahasa terkadang bermakna wajib.⁴³

Secara etimologi sedekah berasal dari bahasa Arab *ash-Shadâqah*, yang berarti, suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti pemberian yang diberikan oleh seseorang masebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah* 3, (Bandung : al-ma'arif, 1990)

Sedekah dalam pengertian di atas oleh para fuqaha (ahli fikih) disebut *sadaqah at tawawu* (sedekah secara spontan dan sukarela).⁴⁴

Para ahli fiqih sepakat bahwa hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Namun adakalanya hukum sedekah berubah menjadi haram, apabila harta yang disedekahkan tersebut digunakan untuk kemaksiatan, dan adakalanya berubah menjadi wajib, apabila seseorang bernadzar untuk bersedekah apabila hajatnya terpenuhi, maka sedekah wajib dilaksanakan.

Pengertian sedekah menurut bahasa berarti benar, sedangkan menurut istilah, sedekah yaitu, pemberian dari seorang muslim secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.⁴⁵ Selain itu sedekah juga berarti mendermakan sesuatu kepada orang lain. Shadaqoh berasal dari kata *shadaqah* yang berarti benar, maksudnya shadaqah merupakan wujud dari ketaqwaan seseorang, bahwa orang yang bersedakah adalah orang yang membenarkan pengakuan sebagai orang yang bertaqwa melalui amal perbuatan positif kepada sesamanya baik berupa amal atau yang lainnya.

Antara infaq atau shadaqoh terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infaq berkaitan dengan amal yang material,

⁴⁴ M. Syafi'i El-Bantanie, Zakat, Infaq, Sadakah, (Cet. I Bandung: Salmadani, 2009), h. 11

⁴⁵ M Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, Yogyakarta : Cemerlang Publishing, 2009, h. 14

sedangkan shadaqoh berkitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-material, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.⁴⁶

Yang dimaksud dengan shadaqah (sedekah), pada prinsipnya sama dengan infaq, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih luas. Shadaqah (sedekah) dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istigfar, maupun bacaan-bacaan kalimah *thayyibah* lainnya. Demikian juga shadaqah dapat berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Hal lain yang membedakan keduanya adalah bahwa infak dikeluarkan pada saat seseorang menerima rezeki, sedangkan shadaqah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahan, serta peruntukannya.⁴⁷

2. Dasar Hukum Sedekah

a. Al-Qur'an Tentang Sedekah

Sedekah ini memiliki kemampuan yang sangat dahsyat dibandingkan dengan amalan infak maupun zakat, yaitu terlihat di dalam Alquran :⁴⁸

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

⁴⁶Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF* ...,h. 35

⁴⁷H. Cholid Padulullah,SH, *Mengenal Hukum ZIS(Zakat Infaq dan Shadaqah) dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Jakarta: Badan Amil Zakat,Infaq/shadaqah DKI Jakarta, hlm 7

⁴⁸QS Al-Baqarah : 195

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.(

QS Al-Baqarah : 195)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٥٤

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah : 254).

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣

“(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka” (QS. Al-Anfaal : 3).

b. Hadist Tentang Sedekah

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا، فَصَيَّأَتْنِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْضِي الرَّجُلُ بَصَدَقَتِهِ لَا تَجِدَ مَنْ يَقْبَلَهَا (أخرجه الطبراني)^{٤٩}

⁴⁹ Abdurrahman. *Studi Kitab Hadist*. Yogyakarta: TERAS, 2003

Artinya : *dari khosiroh bin wahbi, rasulullah bersabda : bersedekahlah kamu, maka nanti akan datang suatu zaman yang akan kamu jumpai yaitu: seorang laki-laki sedang berjalan membawa sedekahnya, tetapi dia tidak mendapati orang yang akan menerima sedekah.* (HR. Tabrani).

c. Undang-Undang Tentang Sedekah

Di sisi lain Undang-undang Peradilan agama memperingatkan agar Peradilan Agama tidak menolak untuk memeriksa dan memutuskan perkara sedekah yang diajukan kepadanya dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 229 KHT).

Dengan demikian para Hakim di lingkungan Peradilan Agama wajib memahami konsep-konsep shadaqah dalam Al-Quran, Al Hadist, literatur-literatur fikih, dan praktek-praktek dalam konteks sedekah yang telah tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat muslim sebagai acuan kontekstual nilai-nilai hukum yang hidup.⁵⁰

Sedekah dalam konteks *kullu ma'rufin* shadhaqatun mencakup sikap dan tindak tanduk setiap muslim dalam hubungannya dengan Tuhan, manusia dan lingkungan alam semesta.⁵¹

⁵⁰ Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 kesalahan dalam sedekah* (Jakarta: Qultum Media,2010), hlm 25

⁵¹ Alfurqon. Hasbi. *125 Masalah Zakat*. Solo: Tiga Serangkai, 2008.

Sumber energinya dapat berubah benda dan jasa yang diubah dan menjelma dalam bermacam- macam bentuk sedekah antara lain tsbih, takbir, tahmid, tahlil, amar maruf nahi munkar, zakat, hibah, wakaf.

Penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang disebut *shadaqah* ialah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata'ala dan pahala semata.

Orang-orang atau Lembaga Sosial atau sasaran yang berhak untuk memperoleh benda sedekah disyaratkan: harus ahlul khair wal muruat, dan sangat membutuhkan bantuan. Orang-orang atau pengurus Lembaga Sosial Islam yang berhak sedekah, harus mengikrarkan akad sedekahnya kepada *mutashaddaq 'alaihi*, baik secara lisan maupun tertulis.⁵²

Apabila unsur-unsur sedekah tersebut kurang, maka harus dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi sedekah. Sebaliknya jika terdapat cacat hukum pada syarat-syarat yang melekat pada sedekah tersebut, maka sedekah harus dinyatakan tidak sah secara hukum.⁵³

3. Macam-Macam Sedekah

a. Sedekah wajib

⁵² Tim Penyusun, *Suplemen Enslikopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996. Hlm 259

⁵³ Syarbini Amirullah. *Sedekah Mahabisnis dengan Allah*. Jakarta : Kultum Media 2012

Sedekah wajib yaitu, apabila sedekah tersebut diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan sementara kita dalam keadaan mempunyai apa yang ia butuhkan. Misalnya saja kita mempunyai makanan sementara ada orang yang kelaparan, maka hukumnya wajib bagi kita untuk bersedekah. Selain itu hukum sedekah juga menjadi wajib ketika seseorang bernadzar untuk bersedekah.

Hukum sedekah wajib juga, misalnya ketika kita bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara kita mempunyai makanan lebih dari apa yang ia perlukan saat itu. Selain itu, hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar untuk bersedekah kepada seseorang, kelompok ataupun lembaga tertentu.⁵⁴

b. Sedekah sunnah

Selain dari sedekah yang wajib (zakat dan kafarat), agama juga menganjurkan supaya bersedekah pada jalan Allah secukupnya apabila ada kepentingan-kepentingan yang memerlukan, baik pada hal-hal tertentu ataupun pada kemaslahatan umum.⁵⁵

Firman Allah Swt.:

⁵⁴ Sabbid Sayiq, *Fiqh Sunnah*. Penerjemah Nor Hasanudin Dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016

⁵⁵ *Ibid* hlm 22

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ⁵⁶

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Al-Baqoroh:261)

Dari ayat tersebut teranglah bahwa sedekah pada jalan Allah (kebaikan) itu akan mendapat ganjaran tujuh ratus kali dari harta yang di sedekahkan, bahkan Allah akan melipatgandakan dari itu bagi siapa yang di kehendaki-Nya.

C. Pengemis dan Implimintasinya

1. Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis.⁵⁷

Pengemis kebanyakan adalah orang-orang yang hidup mengelandang. Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman

⁵⁶ Khalid bin Sulaiman ar- rabi, Shodaqoh Memang Ajaib, (Solo, Wacana Ilmiah Press, 2006), 69

⁵⁷ Maghfur Ahmad “Strategi Hidup Pengemis dan Gelandangan (gepeng)”, *Jurnal Ilmiah*, STAIN pekalongan Vol. 7 No. 2, Tahun 2010, hlm 2

tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal.⁵⁸

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.⁵⁹

Weinberg menggambarkan bagaimana pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Dalam kaitannya dengan ini, Rubington & Weinberg menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang pada kumpulan masyarakat pada umumnya.

Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas dalam bekerja. pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang tidak mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan tanpa

⁵⁸ *Ibid*, hlm 3

⁵⁹ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 216

menggunakan aturan dari pemerintah, yang sering disebut dengan istilah kumpul kebo mengakibatkan anak-anak keturunan mereka menjadi generasi yang tidak jelas, karena tidak mempunyai akte kelahiran. Sebagai generasi yang frustrasi karena putus hubungan dengan kerabatnya di desa.⁶⁰

2. Dasar Hukum Larangan Pengemis

Hukum haram/larangan memberi sedekah pengemis belakangan ini ramai diperbicarakan di media seperti yang diluncurkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Di Jakarta, MUI memberikan fatwa haram memberi sedekah kepada pengemis di jalan, dan memberikan untuk melarang masyarakat memberi sedekah pengemis.

Fatwa MUI memang wajar dan saya membenarkan fatwa itu. Pasalnya, di Kota banyak pengemis “jadi-jadian” yang sebetulnya kaya dan memiliki jaringan pengemis meminta-minta beroperasi di jalan.

Dengan situasi dan kondisi seperti ini, maka hukum memberikan sedekah pengemis itu haram. Inilah alasan hukum larangan memberi sedekah pengemis.

Dengan kita memberi pengemis, justru pengemis akan semakin tumbuh berkembang dan menjadi profesi yang menjanjikan. Dalam keadaan

⁶⁰ Sarlito Wirawan sarwono, *Masalah- masalah Kemasyarakatan Indonesia*, (Jakarta: Sinar harapan; 2005) hlm. 4

ini, justru dampak yang dihasilkan adalah mudarat, bukan maslahat. Nah, jika sudah mudarat, maka hukumnya haram memberi pengemis.

Jika kondisi memberi pengemis itu sudah mudarat, maka baik yang memberi maupun yang diberi hukumnya haram dan mendapatkan dosa. Kenapa mendapatkan dosa? Sebab, tindakan sedekah itu justru mendatangkan kemudaran.

a. Al-Qur'an

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”⁶¹

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۚ ٢٤ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ٢٥

⁶¹ QS. Al-Baqarah : 273

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.⁶²

b. Hadist

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةٌ لَحْمٍ⁶³

Artinya: *Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, pada hari kiamat ia tanpa memiliki sekerat daging diwajahnya.* (HR. Bukhari)

Meminta-minta pada hakikatnya sama saja dengan menghinakan diri sendiri. Terbiasa untuk meminta-minta akan membuat seseorang menjadi ketergantungan atau merasa selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih jika seseorang itu meminta dengan cara memaksa bahkan hingga menyakiti orang yang diminta.

c. Undang-Undang

⁶² QS. Al-Ma’arij : 24-25

⁶³ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah BULUGHUL MARAM Koleksi Hadis-hadis Hukum*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), hlm. 242-243

Selanjutnya didalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantardi pelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggungjawab atas penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Umum yang layak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa penyelenggaraan sosial bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ditegaskan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha pembinaan yang bertujuan untuk memberikan rehabilitasi agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai Warga Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun social.

3. Implikasi Perbuatan Mengemis

Di berbagai kota besar pengemis muncul biasanya karena mereka tidak bisa terserap disektor perekonomian firma kota, dengan bekal keterampilan yang serba terbatas dan lebih banyak dari mereka yang tidak memiliki keterampilan dan juga pendidikan yang rendah, serta tidak memiliki aset produksi sendiri, maka salah satu “pekerjaan” yang bisa mereka lakukan adalah dengan meminta-minta belas kasihan dari orang lain. Di kota Bandar Lampung, kehadiran pengemis memang dengan mudah bisa ditemui di jalan-jalan. Mereka biasanya menengadahkan tangan pada setiap mobil dan kendaraan bermotor yang berhenti di lampu merah. Dalam kenyataan yang agak sulit membedakan antara pengemis dan pengamen, untuk menarik perhatian masyarakat agar berbelas kasihan kepada mereka, para pengemis memiliki berbagai macam cara yaitu sebagian pengemis memang mengemis dengan ala kadarnya, dengan menengadahkan tangan

atau bergumam tak jelas. Sebagian ada yang mengemis sambil memainkan alat musik kempyeng yang terbuat dari tutup botol yang dipipihkan. Bagi pengemis yang agak kreatif, mereka tak segan-segan memakai pakaian kumal khusus.

Melihat fakta sosial ini, maka dapat disimpulkan kegiatan mengemis bukanlah kegiatan yang terdesak, namun menjadi sebuah kegiatan rutinitas dan lapangan kerja. Pengemis menggunakan berbagai macam cara untuk menarik iba masyarakat. pengemis dapat dibedakan menjadi empat macam, sesuai dengan lokasi dan tempat mereka mangkal. Pengemis yang biasanya beroperasi dan mangkal di berbagai perempatan jalan atau sekitar kawasan lampu merah, pengemis yang mangkal ditempat-tempat umum tertentu, seperti misalnya di plaza, terminal, pasar, pengemis yang beroperasi di tempat-tempat yang mempunyai nilai religius, pengemis yang biasa berkeliling rumah-rumah, keluar masuk kampung. Dari empat macam pengemis diatas yang termasuk pengemis yang melanggar ketertiban umum adalah pengemis yang beroperasi dan mangkal di berbagai perempatan lampu merah, pemberhentian sementara sepeda motor dan mobil. Kegiatan mengemis dengan meminta-minta di perempatan jalan yang akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum itulah yang dilarang oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung dan pengemis yang dilarang dan terkena sanksi pidana yakni yang mengganggu ketertiban umum.

4. Komunitas Pengemis

Pengemis adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan dari pembangunan, dan di sisi lain memiliki pola hidup yang berbeda dengan masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra kumuh di perkotaan. Sebagai kelompok marginal, pengemis tidak jauh dari berbagai stigma yang melekat pada masyarakat sekitarnya. Stigma ini mendepresikan pengemis dengan citra yang negatif. Pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti kotor, sumber criminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat.⁶⁴

Pandangan semacam ini mengisyaratkan bahwa pengemis, dianggap sulit memberikan sumbangsih yang berarti terhadap pembangunan kota karena mengganggu keharmonisan, keberlanjutan, penampilan, dan konstruksi masyarakat kota. Hal ini berarti bahwa pengemis, tidak hanya menghadapi kesulitan hidup dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan sosial budaya dengan masyarakat kota. Akibatnya komunitas pengemis harus berjuang menghadapi kesulitan ekonomi, sosial psikologis dan budaya. Namun demikian, pengemis memiliki potensi dan kemampuan untuk tetap mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

⁶⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Memerdayakan Rakyat*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hlm 12

Indikasi ini menunjukkan bahwa pengemis mempunyai sejumlah sisi positif yang bisa dikembangkan lebih lanjut.

5. Lokasi

Pengemis di Kota Bandar Lampung merupakan pindahan dari daerah-daerah diantaranya dari Desa di berbagai Kabupaten di Provinsi Bandar Lampung. Banyaknya pengemis kedatangan dari daerah ke Kota Bandarlampung karena banyaknya penduduk, tingginya angka kemiskinan, sehingga anak-anak yang sepatutnya sekolah malah pergi mengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Di Kota Bandarlampung beberapa tempat dijadikan ladang bagi pengemis untuk mengeruk rezeki, di beberapa pemberhentian lampu lalu lintas di Kota Bandar Lampung.

6. Penghasilan Pengemis

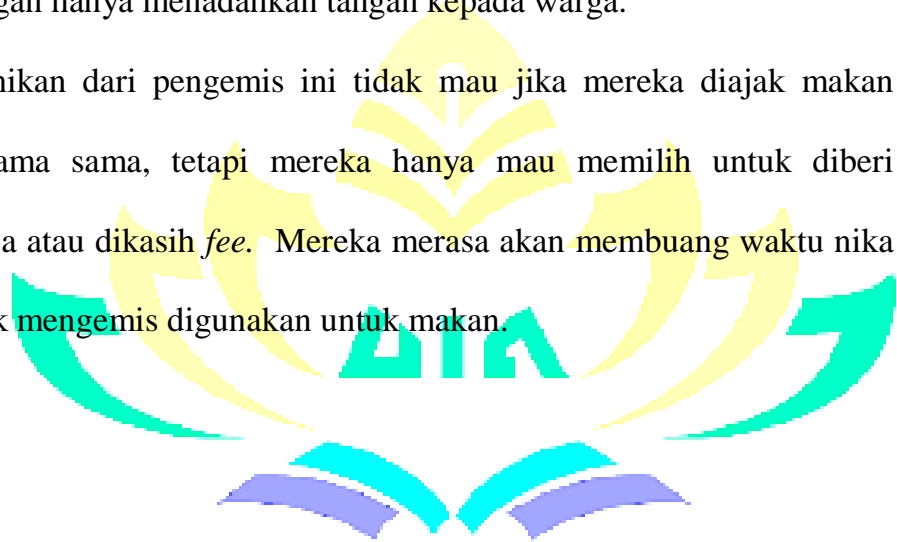
Pengemis Merupakan Jenis pekerjaan yang dilakukan banyak orang yang latar pendidikannya sangat rendah dan termasuk sebagai orang-orang miskin, berpakaian bolong-bolong dan sedikit kumuh merupakan ciri-cirinya.

Kebanyakan pengemis bekerja lebih dari 8 jam sehari, sebagian diantaranya lebih dari 11 jam sehari, setiap pengemis yang bekerja sebagai pengamen atau pengemis mereka bukan saja rawan diancam tetapi tertabrak kendaraan, tetapi acap kali juga rentan terhadap serangan penyakit akibat

cuaca yang tak bersahabat atau kondisi lingkungan yang buruk seperti tempat pembunagan sampah.

Banyak pertanyaan muncul, apakah pengemis dapat mencukupi kehidupan. Untuk menjawab ini penulis menanyakan beberapa pengemis, ada yang mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000 hingga Rp. 300.000 perhari dengan hanya menadahkan tangan kepada warga.

Keunikan dari pengemis ini tidak mau jika mereka diajak makan untuk bersama sama, tetapi mereka hanya mau memilih untuk diberi uangnya saja atau dikasih *fee*. Mereka merasa akan membuang waktu nika waktu untuk mengemis digunakan untuk makan.



BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Pengertian Perda

Sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Peraturan Perundangan-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (PERDA) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Kepala Daerah.⁶⁵

Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah I adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dn tugas pembantuan serta merupakan penjabaran

⁶⁵ Syarif Hidayat, *Desentralisasi untuk Pembangunan Daerah*, Jakarta: Peraturan Daerah edisi 14 Tahun IV, Oktober-Desember 2006.

lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirri khas masing-masing daerah.⁶⁶

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan, materi dan muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pemberitahuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati Walikota. Apabila dalam suatu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan Materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang di sampaikan DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati atau Walikota dipergunakan sebagai bahan peraturan.⁶⁷

Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama anatar DPRD dengan kepala daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/Kabupaten/Kota dan Tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang

⁶⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta, 2011, hlm 70

⁶⁷ *Ibid*, hal.72

lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah (Undang-undang Nomor 12 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah).

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan system hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metodologi standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

B. Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (1) 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu, berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuklah daerah otonom yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

- b. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- d. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom Tingkat I ataupun II harus selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah dalam pertanahan dan keamanan yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonom yang nyata dan bertanggung jawab.⁶⁸

Selanjutnya bahwa di dalam 18A UUD 1945, disebutkan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,

⁶⁸ Moh. Mahfud, MD., Politik Hukum di Indonesia, cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm.9.

diatur sebagaimana mestinya oleh undang-undang dengan tetap memperhatikan keragaman daerah.

C. Gambaran Isi Perda No 3 Tahun 2010 tentang Larangan Memberi Pengemis.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tertib pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan adanya hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diletakkan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal itu, maka pelaksanaan otonomi daerah diarahkan pada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab agar dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Pengertian daerah otonom sebagaimana ditegaskan dalam “ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah setempat dalam pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan

pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berbagai kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mulai saat itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui pemberian otonomi, banyak daerah-daerah yang berkembang sangat pesat terutama pada daerah perkotaan, tetapi juga tidak sedikit daerah yang mengalami banyak kesulitan dan tantangan pembangunan. Bagi daerah-daerah yang mengalami perkembangan pesat, ternyata juga menghadapi masalah dan tantangan, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, sementara ketersediaan lahan pemukiman terbatas. Begitu juga pada daerah yang maju pesat, menjadi daya tarik bagi warga di daerah-daerah sekitarnya, sementara keterampilan mereka untuk mencari penghidupan di Kota sangat terbatas.

Kondisi inilah yang pada akhirnya menyebabkan lahirnya masalah-masalah perkotaan, antara lain kriminalitas, pengangguran, dan tumbuhnya pengemis. Persoalan-persoalan kota sebagaimana yang tergambarkan diatas, juga terjadi.

Persoalan-persoalan kota sebagaimana yang tergambarkan di-atas, juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Sejumlah warga Kota Bandar

Lampung menyayangkan pemerintah setempat belum melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. "Buktinya masih banyak pengemis berkeliaran di lampu merah.

Keberadaan mereka sangat mengganggu dan mengkhawatirkan. Sehingga tidak jarang masyarakat yang mengungkapkan kegelisahannya pada aparat pemerintah yang seharusnya melaksanakan perda tersebut, sudah dipasang tentang perda tersebut yang dilengkapi gambar Wali Kota Bandarlampung Herman HN. "Di sana jelas tertulis larangan dan ancaman memberikan sesuatu kepada pengemis atau anak jalanan, tetapi masih banyak pengemis di sana.

Semestinya, jika melarang pengguna jalan memberikan sesuatu, para pengemis dan anak jalanan tersebut dilakukan pembinaan agar tidak "beroperasi" lagi. "Umumnya pengendara memberikan sesuatu memang karena iba atau khawatir kendaraannya diganggu oleh mereka. Semestinya pemerintah menertibkan para pengemis dan anak jalanan tersebut," terlihat aksi dari aparat pemerintah untuk menertibkan dan mengeksekusi pelaku pelanggar perda tersebut. "Kita pengguna jalan serba salah. Ingin memberikan sesuatu terutama berupa uang kepada pengemis dan anak jalanan itu, namun larangan dalam perda jelas yakni ada ancaman hukuman penjara dan denda yang cukup besar. Karena itu, mereka pun meminta pemerintah setempat segera melakukan penertiban kepada anak jalanan dan

pengemis yang masih beroperasi di sejumlah pertigaan atau perempatan lampu merah. Pantauan di sejumlah lokasi yang kerap dijadikan tempat oleh para pengemis, pengamen dan anak jalanan untuk meminta-minta yakni di pertigaan Jalan Teuku Umar-A Rivai (arah RSUD Abdoel Moeloek), pertigaan Jalan Teuku Umar-Jalan Urip Sumoharjo, pertigaan Jalan Teuku Umar-ZA Pagaralam-Sultan Agung, perempatan Jalan Sultan Agung-Jalan Ki Maja. Ketika pagi hingga sore pengemisnya mayoritas lansia, sedangkan sore hingga malam hari anak-anak dan remaja.

Sementara itu, di dalam Perda Kota Bandarlampung No. 03 Tahun 2010, tertulis ketentuan larangan yakni Setiap orang pengemis dilarang mengemis, mengamen atau menggelandang di tempat umum dan jalanan. Kemudian, Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu di tempat umum dan jalanan yang dapat mengancam keselamatannya, keamanan dan kelancaran penggunaan fasilitas umum.⁶⁹

Bahwa meskipun ketentuan Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terlantar dipelihara oleh negara”, namun ketentuan pasal tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar atau alasan hukum untuk melakukan pembiaran maupun meniadakan tindakan tegas negara

⁶⁹ (<http://www.lampungpost.com/aktual> Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2018 Pukul 14.00 WIB)

dalam menanggulangi masalah pengemis tersebut. Untuk menjaga ketertiban umum, membangun masyarakat Indonesia yang mandiri dan berbudi pekerti luhur serta memberikan rasa aman, tenteram bagi masyarakat luas, maka sangat beralasan apabila diperlukan upaya penanggulangan yang lebih serius terhadap permasalahan gelandangan dan pengemis ini mulai dari yang sifatnya preventif sampai dengan upaya-upaya yang sifatnya represif melalui penerapan atau fungsionalisasi Hukum Pidana, misalnya berupa pemberian sanksi pidana agar memberikan efek jera kepada gelandangan dan pengemis.

Beberapa aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman/landasan dalam rangka penanggulangan atau penanganan masalah gelandangan dan pengemis tersebut secara umum dan pada khususnya di Kota Bandar Lampung, termasuk yang didalamnya menegaskan dapat diterapkannya ketentuan Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Disamping peraturan perundang-undangan tersebut tersebut diatas ada pulaberupa peraturan kebijakan seperti misalnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan pengemis.

Aturan-aturan yang tegas dan sifatnya represif mengenai penanganan pengemis memang tetap diperlukan mengingat ketentuan tersebut dapat menghambat laju serta mempersempit ruang gerak gelandangan dan pengemis itu sendiri di masyarakat, disamping tetap pula harus dikedepankan upaya-upaya penanggulangan yang sifatnya preventif dan persuasif. Pemikiran seperti ini sangat berdasar mengingat kebijakan Hukum Pidana itu sendiri menegaskan adanya cara *penal* dan *non* penal dalam rangka penanggulangan kejahatan atau pelanggaran hukum di masyarakat.⁷⁰

Secara umum dalam hukum positif Indonesia, kegiatan pergelandangan dan pengemisan tersebut ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana).

Pasal 504 KUHP menegaskan sebagai berikut :

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ed. I. Cet. Ke-3, Kencana, Jakarta (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I), hlm 77.

1. Barang siapa mengemis ditempat umum, diancam, karena melakukan pengemis, dengan pidana kurungan selama-lamanya enam minggu;
2. Pengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.⁷¹

Selanjutnya, ketentuan Pasal 505 KUHP menegaskan sebagai berikut:

1. Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan;
2. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.⁷²

Ini berarti kegiatan mengemis menurut hukum adalah dilarang dan merupakan suatu tindakan pidana yang patut dihukum. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan mengemis diatur dalam KUHP, namun Pemerintah Daerah (Perda) dapat pula menetapkan peraturan soal larangan tersebut.

Secara substansi, ketentuan hukum pidana bagi gelandangan dan pengemis tetap diperlukan dalam rangka menanggulangi permasalahan

⁷¹ Moeljatno, 2012, KUHP = *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. Ke-30, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 184

⁷² *Ibid.*

pengemis tetap di perlukan dalam rangka menanggulangi permasalahan pengemis di Kota Bandar Lampung. Ideal nya dengan adanya ketentuan Hukum Pidana tersebut sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan mmembina masyarakat,⁷³ maka hal tersebut seharusnya dapat memepengaruhi pola perilaku masyarakat dan membuat masyarakat itu tidak memilih untuk melakukan kegiatan sebagai pengemis.

D. Bentuk Larangan dan Sanksi Bagi Pemberi Pengemis

Juga tertuang, setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan atau barang kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum dan jalanan. Sedangkan sanksi dalam perda tersebut yakni, pelaku akan dikenakan sanksi berupa pembinaan dengan cara interogasi, identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan mengemis di tempat umum dan atau jalanan yang disaksikan oleh aparat dan atau petugas yang berwenang dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Bagi gelandangan dan pengemis yang telah memperoleh pembinaan ternyata masih melakukan aktivitas mengemis akan diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp

⁷³ Otje Salman, dan Anton F. Susanto 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Ed. Ke-2 Cet. Ke-1, Alumni, Bandung, hlm 33-35.

5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Dan bagi mereka yang memberikan sesuatu, diancam sanksi berupa kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).⁷⁴

E. Implementasi Perda No 3 Tahun 2010 tentang Larangan Memberi Pengemis

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksana atau penerapan istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa to implement the means for carryingout to give practical effect to Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.⁷⁵

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan

⁷⁴ (<http://www.lampungpost.com/aktual> Diakses Pada Tanggal 28 Juni2018 Pukul 14.00 WIB)

⁷⁵ Nugroho, D Riant. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedi. Hlm 60.

harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Sedangkan Peraturan Daerah sendiri ialah merupakan produk kompromis antara DPRD dan Kepala Daerah yang merupakan salah satu kewenangan dari pada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerah.

Beberapa permasalahan yang terjadi terkait pembangunan daerah Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial yaitu dengan adanya keberadaan Pengemis, Anak jalanan dan Gelandangan. Masalah umum gelandangan dan pengemis pada hakikatnya erat kaitannya dengan masalah keamanan dan ketertiban. Dengan adanya perkembangan pengemis dan gelandangan maka akan berpeluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban umum dan salah satu penghambat terwujudnya Bandar Lampung sebagai kota aman dan nyaman. Sangat memprihatinkan, diantara mereka kebanyakan anak-anak sejak usia balita sampai usia sekolah. Banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya. Mereka harus mengais rezeki dengan cara mengemis, mengamen, atau berjualan Koran. Masalah yang akan timbul yaitu keberadaan pengemis dan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan tersebut akan sangat dapat mengganggu keamanan dan ketertiban khususnya bagi masyarakat pengguna jalan.

Ada tiga landasan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah, yaitu: pertama, landasan filosofis yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah ke dalam suatu rencana atau draft peraturan Negara (Pancasila). Kedua, landasan yuridis yaitu ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan (Undang-Undang Dasar 1945). Ketiga, landasan politis yaitu garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan Pemerintah Negara (Garis-Garis Besar Haluan Negara).

Perkembangan Kota Bandar Lampung yang berkembang dengan pesat, menjadikannya salah satu tempat tujuan para pengemis. Gejala ini tentu akan memiliki berbagai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari gejala ini adalah semakin meningkatnya pengangguran, sempitnya lapangan pekerjaan, serta meningkatnya angka gelandangan dan pengemis. Hal ini menjadi pendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatur ketertiban sosial tersebut berupa Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang Larangan memberi pengemis Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatur ketertiban sosial tersebut berupa Perda No. 3 Tahun 2010 Tentang Larangan

memberi pengemis yang didalamnya mencakup tentang penertiban, pembinaan dan pelayanan terhadap gelandangan dan pengemis.

F. Dampak dari Penerapan PERDA No. 3 Tahun 2010 Tentang Larangan Memberi Sesuatu Pada Pengemis di Kota Bandar Lampung.

Peraturan daerah kota Bandar Lampung No 3 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum telah berjalan selama 8 Tahun. Awal diberlakukannya peraturan daerah ini pada saat masa sosialisasi masih terdapat pengemis dan pengendara yang memberi. Akan tetapi oleh Sat PolPP selaku penegak Perda, ditegur dengan ditunjukannya papan larangan memberi kepada pengemis di Lampu Merah.

Hasil pemberlakuan Perda setelah 8 tahun berjalan berdasarkan alasan yang pembentuknya adalah sebagai berikut:

a. Untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum

Secara bertahap, tahun demi tahun Perda tersebut setelah ditaati masyarakat dengan baik, sehingga tidak ada lagi pengemis di Lampu Merah. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 tahun 2010 dinilai belum terlalu efektif oleh pemerintah, karena masih sedikit nya pengemis

yang berkeliaran di Lampu Merah dan di sekitar Bandar Lampung, tetapi sedikit demi sedikit pengemis sudah mulai berkurang. Sat PolPP terus melakukan razia penertiban setiap Minggu dengan cara menelusuri jalan di wilayah kota Bandar Lampung. Penerlusuran dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi pengemis di sekitar Lampu merah dan Pasar.

b. Untuk Menghindari Kemacetan dan Kecelakaan

Dengan diberlakukannya Perda tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, masyarakat tidak mengeluh lagi dengan keberadaan pengemis. Jika masih melihat pengemis beroperasi disekitar lampu merah pasti ada yang melaporkan pada Sat Polpp, sehingga akan segera ditertibkan. Selain itu, tidak ada kemacetan di lampu merah karena sudah tidak ada lagi pengemis yang beroperasi dan tidak ada lagi kecelakaan yang melibatkan pengendara dengan pengemis disekitar lampu merah sehingga keselamatan antara pengendara dan pengemis terjaga.

Menurut pengamat penulis, secara umum di perempatan lampu merah dikota Bandar LAampung sekarang terlihat sudah tidak ada lagi pengemis yang meminta-minta. Akan tetapi, di beberapa titik perempatan jalan, terkadang masih terlihat pengemis di lampu merah dan beberapa pengendara yang memberinya uang sementara itu tidak ada Satpol PP yang melakukan penertiban. Dari hasil pengamatan,

pengemis tersebut satu diantaranya sudah tergolong bukan usia produktif lagi sedangkan dua lainnya masih berusia produktif, artinya pengemis tersebut masih sanggup untuk bekerja.

Salah satu pengendara yang memberikan sedekah kepada pengemis tersebut memberikan keterangan bahwa sebenarnya ia mengetahui sedekah kepada pengemis tersebut memberikan keterangan bahwa sebenarnya ia mengetahui hal tersebut tidak diperbolehkan oleh peraturan daerah. Tetapi, tetap memberikan sedekah kepada pengemis tersebut karena merasa iba.

Seharusnya dengan adanya kebijakan tersebut keberadaan pengemis paling tidak dapat ditertibkan dan meminimalisir jumlah pengemis yang berkeliaran. Akan tetapi keberadaan pengemis ditengah-tengah masyarakat masih banyak dan bahkan semakin merajalela. Sebelumnya kita melihat mereka kebanyakan di persimpangan lampu merah, pasar,tetapi sekarang aksi mereka sudah sampai di tempat-tempat ibadah, rumah makan, bahkan ruko-ruko yang ada di sepanjang jalan.

Berdasarkan observasi dari implementasi kebijakan belum terlaksana dengan maksimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya tidak tepat pada tujuan dan harapan yang diinginkan . Dapat dilihat bahwa tujuan dan harapan peraturan daerah ini adalah sebagai bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan tindakan *preentif* (*pencegahan*),*represif*,*rehabilitatif*, tidak terlaksananya dengan indikasi

masih banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran ditempat-tempat umum seperti persimpangan lampu merah, jembatan penyebrangan, pusat perbelanjaan dan lain-lain.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2010 Tentang Larangan Memberi Pengemis

Dalam Perda No 3 Tahun 2010 dijelaskan pada pasal 6 (3) bahwa Pelaksanaan usaha dilakukan oleh Dinas sosial dan/atau bekerjasama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan. Oleh karenanya dalam pemenuhan hak-hak pengemis diperlukan adanya peran dari semua *stakeholder* baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintah secara bersama dan saling berinteraksi. Sebagaimana tercantum dalam naskah Program Nasional Bagi Anak Indonesia bahwa sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak diperlukan adanya upaya mendorong semua tindakan yang menyangkut kepentingan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga peradilan, lembaga legislative maupun

masyarakat akan memberikan prioritas tinggi kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, demi kepentingan terbaik anak Indonesia. Masing masing pihak saling bekerja sama sehingga tercapai sinergi antar pihak dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah anak.

Masing-masing *stakeholder* tersebut memiliki peran yang sangat penting sesuai dengan tugas mereka dalam melaksanakan penertiban anak jalanan dan pengemis. Tugas Satpol PP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Salah satu tugas Satpol PP menyelenggarakan ketertiban umum dari segala macam gangguan, termasuk anak jalanan serta pengemis yang ada di tempat-tempat umum. Peran Satpol PP dalam hal ini sangat penting dalam pelaksanaan penertiban anak jalanan dan pengemis, penertiban dilakukan oleh Satpol PP setiap sore Setelah ditangkap anak-anak ini didata dan kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung pasal 3 dijelaskan bahwa tugas pokok dinas sosial yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial berdasarkan atas otonomi

dan tugas pembantuan. Anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial, dalam hal ini berperan sebagai lembaga swasta yang menampung anak-anak serta gepeng dari Dinas Sosial yang sudah sepatutnya harus dibina.

Berdasarkan penjelasan diatas, telah dijelaskan bahwa tiap masing-masing *stakeholder* terlibat dan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu masing-masing pihak diharapkan mampu menciptakan interaksi dan hubungan system kerjasama yang baik. Dengan adanya hubungan kerja sama yang baik antar pemerintah, swasta dan masyarakat maka akan tercipta pemerintah yang baik dan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Sebagaimana dikatakan oleh Sedarmayanti bahwa *good governance* yang efektif menuntut adanya kerja sama yang baik dan integritas, profesionalisme serta kerja dan moral yang tinggi. Kerja sama ini tentunya dibutuhkan komitmen semua pihak terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Permasalahan anak jalanan dan pengemis merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Maka dari itu permasalahan ini perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan (*multistakeholders*). Meskipun telah ada peraturan daerah mengenai larangan mengemis, namun pada kenyataannya masih banyak anak jalanan dan pengemis di tempat-tempat umum di kota Bandar Lampung. Banyaknya pemangku kepentingan

sehingga di perlukan kerja sama antar masing-masing pihak agar tercapai tujuan yang ingin dicapai.

Pengemis yang berkeliranan dijalanan tidak semuanya dikategorikan orajg miskin. Karena pengemis-pengemis tersebut melakukan tindakan yang dihramkan oleh Islam yaitu meminta-minta. Mereka meminta-minta dengan berbagai faktor. Hanya sebagian kecil, yang memang keadaan mereka tidak memungkinkan hidup tanpa meminta-minta. Sedangkan pengemis lainnya, meminta-minta bukan karena keadaan darurat tetapi karena pekerjaan mereka meminta-minta. Kepala daerah dan atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah mempunyai wewenang untuk melarang pengemis baik yang dilakukan secara perorangan, kelompok dan atau disuruh orang lain untuk meminta-minta di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam ketentuan pengemis Peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 untuk melaksanakan ketentuan tersebut perlu dilakukan dengan penertiban atau razia. Oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2010 terutama dalam hal penertiban pengemis dikota Bandar Lampung kegiatan penertiban dilakukan melalui kegiatan razia.

Kegiatan razia tersebut bertujuan agar dapat meminimalisir keberadaan pengemis di Kota Bandar Lampung yang melakukan aktifitasnya di lampu merah, pasar, dan di ruko-ruko yangf dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum khususnya bagi masyarakat

pengguna jalan yang dimana aktivitas tersebut merupakan pelanggaran peraturan daerah. Kegiatan razia dapat membantu mencegah agar pelanggaran tersebut tidak terus-terusan terjadi. Apabila tidak dilakukan razia maka para pengemis tersebut mempunyai ruang untuk terus menurus melakukan pelanggaran. Satpol PP sebagai instansi utama dalam kegiatan razia tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Terutama dalam hal Penertiban dan Penanggulangan pengemis di Kota Bandar Lampung penanggulangan pengemis dapat dilakukan melalui pembinaan oleh pemerintah atau perorangan dan atau Badan Hukum.

Pembinaan dilakukan melalui dua cara yaitu bagi pengemis yang berasal dari luar Bandar Lampung akan dipulangkan ke daerah asal mereka sedangkan bagi yang bersal dari Kota Bandar Lampung akan dibina oleh Dinas Kesejahteraan Sosial.dari hasil yang saya dapatkan bahwa berdasarkan informasi pihak instansi dalam pelaksanaan pemulangan pengemis atau gelandangan ke daerah asal mereka hingga saat ini masih ada yang kembali lagi ke Kota Bandar Lampung untuk melakukan aktivitas mengemis di jalan atau di pasar.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Larangan Memberi Pengemis

Memberi memiliki arti yang sangat luas, sebagaimana telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Memberi di katakan memiliki arti yang sangat luas karena member mencakup se mua perbuatan baik. Agar tulisan

ini lebih focus kepada tujuan aslinya, maka definisi memberi harus dikembalikan kepada pengertian member yang dimaksud dalam perda ini, yaitu memberikan sejumlah peminta-minta. Dengan demikian, penulis hanya membahas memberi dalam arti sempit.

Orang miskin adalah termasuk ke dalam salah satu golongan yang berhak menerima sedekah. Dan Islam berpandangan orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta belas kasihan orang lain.

Meminta-minta hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat saja. Seperti meminta-mintanya orang yang kelaparan dan di khawatirkan akanmengkibatkan kematian atau meminta-mintanya orang yang tidak mempunyai pakaian untuk menutup auratnya. Juga meminta-mintanya orang yang sakit dan memerlukan obat. Meminta-minta disini pun tidak boleh dilakukan secara terus menerus. Ada batasan-batasannya. Dengan demikian meminta-minta tidak boleh dijadikan sebuah profesi atau pekerjaan sehari-hari yang biasa dilakukan pengemis-pengemis dijalanan.

Di dalam hal tersebut ada tiga macam orang yang dihalalkan meminta yaitu: pertama, orang yang menanggung hutang orang lain hingga ia dapat melunasi hutang tersebut. Kedua, orang yang mendapat musibah sehingga hutangnya habis diperbolehkan meminta sampai ia memperoleh pendapatan tetap dari usahanya. Ketiga, ialah orang yang dinyatakan pailit setidaknya hal itu dinyatakan oleh tiga orang ahlinya hingga ia dapat memulai kembali usahanya dengan lancer. Selain dari ketiga macam orang di atas maka

meminta-minta itu haram dan memakan hasil dari meminta-minta pun akan menjadi haram.

Hampir semua pengemis di Indonesia saat ini, tidak termasuk ke dalam kategori yang diperolehkannya meminta-minta dikarenakan mereka tidak dalam keadaan darurat apa pun. Mengemis dijadikan sebuah profesi untuk menunjang kehidupan mereka. Terlebih lagi, beberapa pengemis membawa anak-anak kecil ketika mereka sedang beroperasi. Hal ini akan membawa dampak buruk bagi psikologi pertumbuhan anak tersebut.

Dari segi fisik pun, pengemis-pengemis ini memiliki jasmani yang kuat. Usia mereka pun banyak yang masih produktif. Dari sinilah kita mengetahui bahwa pengemis yang memiliki badan yang kuat dari tidak berhak menerima sedekah. Di kota besar seperti Bandar Lampung, banyak dari pengemis-pengemis tersebut terorganisir dalam sebuah kelompok dan memiliki pimpinan atau gembong. Yang mana kita ketahui, gembong-gembong inilah yang akhirnya akan menerima harta sedekah. Tidak sedikit pula dari pengemis tersebut termasuk orang yang berkecukupan. Hanya saja, mereka tidak mau bekerja karena penghasilan mengemis pun sudah cukup membuat mereka kaya.

Di dalam Al-Quraan, tidak ada ayat yang melarang memberi kepada pengemis. Bahkan sebaliknya, disebutkan agar umat manusia memberikan sedekahnya kepada yang berhak dan membutuhkan. Dalam surat Adz Dzariyaat ayat 19, berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya : *"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."*

Terdapat hadist yang mengatakan pengemis itu harus diberi meskipun datang dengan mengendarai kuda, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ^{٧٦}

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda berilah peminta minta walaupun dia datang dengan menunggang kuda.(hadist riwayat Malik)*

Kita di perintahkan untuk memberikan sedekah kepada yang berhak. Sebaliknya, kita juga dilarang untuk menghamburkan harta kita secara boros. Dengan demikian, jika kita memberikan sesuatu yang seharusnya menjadi hak milik orang lain maka hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan *mubadzir*.

Disebutkan dalam Surat Al Baqarah ayat 273 yang berbunyi :

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

Artinya: *(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka*

⁷⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *AL-LU'LU'WAL MARJAN*, diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003) , hlm. 326

tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

Dari ayat ini, kita juga diperintahkan memberikan sedekah kepada orang miskin yang memelihara diri dari sifat meminta-minta. Kita juga mengenal mereka dari sifat-sifatnya. Maka yang demikian itu lebih diutamakan menerima sedekah. Sedangkan pengemis-pengemis yang meminta-minta di jalanan tidak berusaha menjaga kehormatan diri mereka sendiri. Padahal Rasulullah memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga kehormatan.

Disinilah letak keistimewaan Islam yang sangat menjunjung tinggi arti kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Islam pun memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan Firman Allah.

Dari sini juga, kita memperoleh keagungan Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk menolong orang lain. Jika kita mengetahui ada saudara kita membutuhkan pertolongan, maka kita wajib membantunnya meski saudara kita tidak meminta bantuan kepada kita. Dan sebaliknya, jika kita berada dalam kesusahan, kita wajib meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT semata. Hendaklah kita menjaga diri dari sifat meminta-minta kepada sesama manusia.

Islam adalah yang *fleksibel*. Seiring perkembangan zaman, apabila terjadi masalah baru maka akan terjadi pada hukum yang baru. Tidak menutup kemungkinan, meski tidak ada teks yang menyebutkan untuk melarang memberi sedekah tetapi jika hal tersebut dapat menciptakan kemaslahata bagi banyak manusia maka hal ini dipandang boleh atau bahkan perlu agama Islam. Sesuai kaidah fiqih, yaitu :

Menurut penulis, perda ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Perda ini pun tidak serta-merta melarang umat Islam untuk memberi sedekah secara keseluruhan atau universal. Hanya pada tempat-tempat tertentu saja. Yang sudah dapat dipastikan, di lokasi-lokasi inilah para pengemis professional beroperasi.

Dengan adanya larang ini, harta sedekah tidak akan jatuh ketangan orang yang tidak berhak. Harta sedekah lebih baik disumbangkan kepada lembaga resmi yang khusus mengelola *zakat*, *infaq* maupun sedekah. Dengan begitu, akan lebih banyak manfaat yang didapatkan jika sedekah dikelola dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perda di kota Bandar Lampung No 3 Tahun 2010 adalah masing-masing *stakeholder* tersebut memiliki peran yang sangat penting sesuai dengan tugas mereka dalam melaksanakan penertiban anak jalanan dan pengemis. Tugas Satpol PP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Salah satu tugas Satpol PP menyelenggarakan ketertiban umum dari segala macam gangguan, termasuk anak jalanan serta pengemis yang ada di tempat-tempat umum. Permasalahan anak jalanan dan pengemis merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Maka dari itu permasalahan ini perlu melibatkan banyak pemangku kepentingan

(*multistakeholders*). Meskipun telah ada perturan daerah mengenai larangan mengemis, namun pada kenyataannya masih banyak anak jalanan dan pengemis di tempat-tempat umum di kota Bandar Lampung. Banyaknya pemangku kepentingan sehingga di perlukan kerja sama antar masing-masing pihak agar tercapai tujuan yang ingin dicapai.

2. Pandangan hukum islam terhadap perda no 3 di Bandar Lampung yaitu Pandangan Islam tentang Perda ini yaitu Perda ini tidak secara totalitas melarang umat Islam member sedekah, hanya berlaku pada lokasi-lokasi tertentu saja. Yang mana, di lokasi-lokasi ini para pengemis professional menjalankan pekerjaannya.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa larangan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam karena pengemis-pengemis tersebut telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu, pengemis tersebut tidak berusaha menjaga kehormatan diri mereka dengan meminta-minta yang sudah jelas diharamkan oleh Rasul. Banyak juga dari pengemis-pengemis tersebut yang tidak berhak menerima pemberian sedekah karena Islam juga telah menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menerima pemberian sedekah. Islam sendiri tidak memungkiri adanya aturan baru jika aturan tersebut demi kemaslahatan umatnya. Islam juga tidak memungkiri adanya perubahan hukum seiring perubahan zaman.

Penulis juga berpandangan, Perda ini sangat diperlukan. Baik bertujuan untuk menertibkan pengemis itu sendiri ataupun sekedar menyadarkan para pemberi sedekah, untuk tidak memanjakan para pengemis-pengemis tersebut dengan terus-menerus member sedekah. Perda ini juga berusaha memberikan pendidikan kepada para pemberi sedekah untuk ikut mendidik para pengemis agar penyakit sosial ini tidak semakin parah. Wallahu a'lam.

B. Saran

Dengan adanya ini penulis akan memberi saran kepada berbagai pihak:

1. Kepada Masyarakat

Memberi sedekah lebih baik diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, lebih utama lagi jika kita mengenal orang tersebut, baik kenal secara mendalam lewat kehidupan sehari-hari atau hanya sekedar tahu saja. Atau diberikan lewat lembaga resmi pemerintah maupun swasta yang memang bertugas mengelola *zakat, infaq dan shadaqah*. Memberi juga lebih baik tidak diberikan kepada sembarang orang, apalagi diberikan kepada orang yang jelas kita tahu, profesinya adalah peminta-minta. Selain melanggar aturan Perda ini, kita pun telah melanggar hak orang yang seharusnya lebih berhak menerima sedekah.

2. Kepada Pemerintah

Dengan pemerintah mengesahkan Perda ini, maka pemerintah juga wajib mewujudkan hak-hak rakyatnya. Diantaranya, rakyat berhak mengenyam pendidikan dan mendapat pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerintah juga berkewajiban memberikan pembekalan dengan mengadakan berbagai program-program pelatihan keterampilan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Gelandangan dan Pengemis. Perlu adanya pengawasan lebih dari pemerintah. Tidak hanya sekedar tertera dalam Undang-Undang Dasar saja, bahwa para fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara (pasal 34), tetapi perlu adanya tindak lanjut pemeliharaan yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Tindak lanjut inilah yang dirasakan masyarakat belum optimal.

3. Kepada Lembaga swasta

Perlu adanya kerjasama antar berbagai pihak. Peran lembaga swasta sangat diperlukan dalam hal ini, baik untuk membantu meringankan pemerintah, misalnya dengan membuat program-program pengentasan kemiskinan, program-program bakti sosial masyarakat, program-program pelatihan keterampilan ataupun hanya sekedar mengawasi kinerja pemerintah demi tercapainya tujuan Islam sebagai agama *rahmatan lil a'lamiin* dan tujuan Undang-Undang di Negara ini.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Studi Kitab Hadist*. (Yogyakarta, Teras, 2003).
- Alfurqon. Hasbi. *125 Masalah Zakat*. (Solo: Tiga Serangkai, 2008).
- Al Hafidh , Ibnu Hajar, Al Asqalani, *Terjemah BULUGHUL MARAM Koleksi Hadis-hadis Hukum*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996).
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 4, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005).
- Ahmad, Maghfur, “Strategi Hidup Pengemis Dan Gelandangan (Gepeng)”, (*Jurnal Ilmiah*, Stain Pekalongan Vol. 7 No. 2, 2010).
- Ash-Shidieqy, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995).
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz Ii*. Darul Fikr. (Damaskus. 1996).
- Bin Sulaiman Ar- Rabi, Khalid, *Shodaqoh Memang Ajaib*, (Solo, Wacana Ilmiah Press, 2006).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro. 2010).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua Balai Pustaka*, (Jakarta: 1997).
- El-Bantanie, M.Syafi'I, *Zakat, Infaq, Sadakah*, Cet. I (Bandung, Salmadani, 2009).
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat, Mmberdayakan Rakyat*, (Bandung : Pt. Refika Aditama, 2009).
- Fadilah, Ubai, *Analisis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Menggunakan Metode Fuzzy C-Mean Clustering Dan Biplot*, Skripsi, (Jakarta: Program Studi Matematika Fakultas Sains Dan Teknologi, Uin Sarif Hidayatullah, 2011).
- Hidayat, Syarif, *Desentralisasi Untuk Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Peraturan Daerah, Edisi 14 Tahun Iv, 2006).

Huda, Miftachul, *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Katsir, Ibnu, *Tafsir Al Qur`An Al Azhim Juz Ii*. (Darul Ma`rifah. Beirut. Cetakan Iii. 1989).

Matin, Abdul, Wawancara, Lamongan, Tanggal 13 Oktober 2012.

Mahasin, Ashab, *Gelandangan (Pandangan Ilmuan Sosial)*, (Jakarta: Lp3es, 1986).

M Irfan, El-Firdausy, *Dahsyatnya Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, Yogyakarta.

Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum U11, (Yogyakarta, 2011).

Muslim Bi Syarhi An Nawawi, Sahih, Juz Vii, Darul Fikr. Beirut. 1982.

Moh. Mahfud, Md., *Polotik Hukum Di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Lp3es, 1998).

Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Cet. Ke-30, Bumi Aksara, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ed. I. Cet. Ke-3, Kencana, (Jakarta, 2010).

Narbuko, Cholid, Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Pt. Bumi Aksara, 2012).

Nugroho, D Riant. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. (Jakarta : Gramedi).

Nasruddin dan Dewani Romli, *Diskusi Implementasi Zakat*, Al-` Adalah Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syari'ah IAIN RIL, Vol X, No 1, Januari 2011)

Otje Salman, Dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Ed. Ke-2 Cet. Ke-1, Alumni, (Bandung, 2004).

Padulullah, Cholid, *Mengenal Hukum ZIS (Zakat Infaq Dan Shadaqah) Dan Pengamalannya Di Dki Jakarta*, (Jakarta, Badan Amil Zakat, Infaq/ Shadaqah DKI).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 Tahun 2010 Tentang Pemberian Kepada Pengemis.

Qardhawi, Yusuf, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: Romaja Rosda Karya, 2010).

Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan Dalam Sedekah*, (Jakarta: Qultum Media, 2010).

Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah 14*, (Bandung, Pt Alma'arif, 1987).

Sabbid, Sayiq, *Fiqh Sunnah*. Penerjemah Nor Hasanudin Dkk. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016).

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1990).

Suharto, Edi, *Kebijakan Sosiasl Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: (Rajawali Press, 2003).

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2013).

Syarbini Amirullah. *Sedekah Mahabisnis Dengan Allah*. (Jakarta : Kultum Media 2012)

Tim Penyusun, *Suplemen Enslikopedi Islam*. (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

Wjs. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Wirawan Sarwono, Sarlit, *Masalah-Masalah Kemaysarakatan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan; 2005)

Zallum, Abdul Qadim, *Al Amwal Fi Dawlalil Khilafah*, Cetakan I, Beirut, Darul Ilmi Lil Malayin. 1983.

([Http://Www.Lampungpost.Com/Aktual](http://Www.Lampungpost.Com/Aktual) Diakses Pada Tanggal 28 Juni2018 Pukul 14.00 Wib).

Garis Kemiskinan Indonesia,
[Https://Www.Bps.Go.Id/Linktabledinamis/View/Id/112](https://Www.Bps.Go.Id/Linktabledinamis/View/Id/112) Diakses Pada 18/01/2018 Pukul 00.39.

Jurnal.Pemkot-Bandar-Lampung-Terus-Tertibkan-Anjal-Dan-Gepeng.Html
(Diakses Pada Tanggal 8-11-2017)

[Http://Fakhumuntadzainuddinali.Blogspot.Co.Id/2009/05/Infaq-Danshadaqah.Html](http://Fakhumuntadzainuddinali.Blogspot.Co.Id/2009/05/Infaq-Danshadaqah.Html) (Diakses 13mei2018)

